Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 712 – 717

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Maini Wati[1], Amril M[2]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Indonesia
watimaini11@gmail.com[1], amrilm@uin-suska.ac.id[2]

Kata Kunci:
Kebijakan Pendidikan, Agama, Perguruan Tinggi

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional dan wajib diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini bertujuan membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki moralitas sesuai nilai-nilai keagamaan. Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan seperti pengembangan kurikulum, kompetensi dosen, relevansi materi, serta rendahnya minat dan pemahaman mahasiswa terhadap PAI. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar pendidikan agama Islam tetap relevan dan efektif dalam membangun karakter mahasiswa yang moderat, toleran, dan siap menghadapi tantangan global.

Keywords:
Education Policy, Religion, Higher Education

Abstract

This article aims to analyze the policy of Islamic Religious Education (PAI) in higher education institutions in Indonesia based on the applicable laws and regulations. The research was conducted through a literature study by examining laws, government regulations, and related policies, such as Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and the Minister of Religious Affairs Regulation governing the implementation of religious education in higher education institutions. The analysis results show that Islamic religious education has a strong legal basis within the national education system and must be integrated into the curriculum of higher education institutions, both public and private. This policy aims to shape students who are not only academically excellent but also possess noble character and morality in accordance with religious values. However, the implementation of the policy faces challenges such as curriculum development, lecturer competence, material relevance, and the low interest and understanding of students towards Islamic Religious Education (PAI). Therefore, continuous evaluation and adjustment are needed to ensure that Islamic religious education remains relevant and effective in building students' moderate, tolerant character and preparing them to face global challenges.

Copyright © 2025 Maini Wati, Amril M
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Untuk memulai tulisan ini, penulis merasa perlu membatasi pemahaman mereka tentang istilah kebijakan, yang merupakan kata kunci utama dari topik yang akan dibahas. Kebijakan adalah set gagasan dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana dan pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan tindakan, yang biasanya berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, dll. Dalam konteks tulisan ini, kebijakan pemerintah atau negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi adalah yang dibahas. Oleh karena itu, yang akan dibahas adalah campur tangan pemerintah atau negara dalam mengatur pelaksanaan PAI di perguruan tinggi. Tidak mengherankan bahwa masalah ini mengarah pada kajian politik pendidikan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Kebijakan PAI di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk mencetak lulusan yang memiliki keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan pengetahuan umum. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian, penerapan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi belum mencapai tujuan yang diharapkan sejauh ini. Salah satu penyebabnya adalah variasi dalam cara perguruan tinggi memahami kriteria penerapan kebijakan PAI.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk pendidikan agama, termasuk pembelajaran agama Islam di madrasah, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa harus memiliki pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum mereka. Selain itu, berbagai kebijakan lain mengatur pelaksanaan PAI di perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa.

Meskipun demikian, dalam kehidupan kampus, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI). Beberapa perguruan tinggi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum PAI dengan perubahan zaman dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan oleh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Islam dalam menerapkan kebijakan ini. Beberapa perguruan tinggi menghadapi masalah dalam hal metode pengajaran, keterbatasan tenaga pengajar, dan masalah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut adanya inovasi dalam pengajaran PAI agar tetap relevan dan menarik bagi mahasiswa. Peran digitalisasi dalam pendidikan agama, pemanfaatan media sosial, serta pendekatan yang lebih kontekstual menjadi aspek penting dalam menyusun kebijakan yang efektif. Dalam kenyataannya pembelajaran pendidikan Agama Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan keanekaragaman perguruan tinggi umum, tampak bahwa tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi lingkungan pendidikan yang berubah sangat cepat yang menuntut adaptasi yang tinggi dari para dosen sebagai pendidik.

Di era teknologi komunikasi dan informasi saat ini yang ditandai oleh melimpahruahnya informasi sebagai sumber belajar, menuntut para dosen untuk menjadi kreatif dalam meramu pembelajaran. Demikian pula kondisi internal setiap perguruan tinggi yang beranekaragam dalam berbagai aspek merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi untuk efektifnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang ada guna memastikan bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan mampu membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengkaji berbagai kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut**.**

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan pemahaman teori dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis peraturan-peraturan seperti UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pendidikan agama di perguruan tinggi**.**

HASIL DAN PEMBHASAN

Definisi Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya. Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirancang dan diterapkan oleh individu, kelompok, atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Kebijakan dapat bersifat formal, seperti peraturan pemerintah dan undang-undang, maupun informal, seperti pedoman atau norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Dalam proses perumusannya, kebijakan umumnya didasarkan pada analisis situasi, pertimbangan kepentingan berbagai pihak, serta tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai mekanisme dan strategi agar dapat berjalan efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan diperlukan untuk memastikan relevansi dan dampaknya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan definisi pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik dalam aspek intelektual, moral, sosial, maupun keterampilan, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kata pendidikan selanjutnya sering digunakan untuk menterjemahkan kata education atau teaching dalam bahasa Inggris. Education menunjukkan suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pendidikan dapat berlangsung secara formal melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, maupun secara nonformal melalui pelatihan, kursus, atau pengalaman sehari-hari. Dalam pendidikan, terdapat proses transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik dengan metode yang beragam, seperti ceramah, diskusi, praktik, dan teknologi pembelajaran. Selain itu, pendidikan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

juga berperan dalam membentuk karakter, sikap, dan pola pikir individu agar mampu menghadapi tantangan kehidupan serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai perbuatan (baik hal, cara, dan sebagainya) juga bermakna pengetahuan tentang mendidik, pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, bathin dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah serangkaian aturan, keputusan, dan strategi yang dirancang oleh pemerintah, institusi pendidikan, atau pihak berwenang lainnya untuk mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan sistem pendidikan dalam suatu wilayah atau negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, metode pembelajaran, standar kompetensi, pendanaan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan adalah memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan zaman serta tuntutan global. Selain itu, kebijakan pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta menciptakan masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Sedangkan untuk defenisi dari kebijakan Pendidikan Agama Islam adalah serangkaian peraturan, keputusan, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk mengatur dan mengembangkan pembelajaran Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang perlu diingat adalah tentang tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk terwujudnya insan kamil yang memiliki integritas iman, moral, dan amal, adanya kesatuan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan Agama Islam harus menyentuh tiga ranah, yaitu hati (heart) atau afektif, akal (head) atau kognitif, jasmaniyah (hand) atau psikomotorik. Ketiganya harus berjalan secara simultan, integratif dan holistik Implementasi kebijakan ini mencakup pengintegrasian Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum, pengembangan metode pembelajaran yang relevan, serta penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam membangun karakter moderat, toleran, dan berakhlak mulia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman.

Konsep Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Kebijakan pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang mengatur mata kuliah PAI sebagai bagian dari kurikulum wajib di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan PAI di perguruan tinggi antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan pendidikan agama bagi mahasiswa; 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang mengatur kurikulum PAI sebagai mata kuliah yang harus diberikan dalam program studi non-keagamaan; 3) Kebijakan internal perguruan tinggi, yang mengadaptasi regulasi nasional sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi dilakukan melalui berbagai strategi untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman akademik tentang Islam, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk implementasi utama adalah pengintegrasian PAI sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum, yang mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan pemikiran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, metode pembelajaran juga terus dikembangkan dengan pendekatan interaktif, seperti diskusi, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi digital agar lebih menarik dan efektif. Di luar kelas, perguruan tinggi mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berbasis keislaman, seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), kajian Islam, serta mentoring keagamaan yang bertujuan membangun karakter dan spiritualitas mahasiswa. Peran dosen dan tenaga pengajar juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini, di mana mereka diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi dan mampu menyampaikan materi dengan pendekatan yang moderat dan inklusif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya minat mahasiswa dan pengaruh globalisasi yang dapat memengaruhi cara mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kebijakan ini agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan mahasiswa di era modern.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Penerapan kebijakan PAI di perguruan tinggi dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

Integrasi dalam Kurikulum

Pendidikan Agama Islam dijadikan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dari berbagai program studi;

Kurikulum PAI disesuaikan dengan perkembangan zaman, mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan pemikiran Islam.

Metode Pembelajaran

Penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan pendekatan berbasis teknologi;

Penggunaan media digital dan platform e-learning dalam pembelajaran PAI.

Kegiatan Ekstrakurikuler

Pembinaan keislaman melalui organisasi mahasiswa seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK); Kegiatan kajian Islam, mentoring keagamaan, dan program pembinaan karakter berbasis agama.

Peran Dosen dan Tenaga Pengajar

Kualifikasi dan kompetensi dosen PAI dalam menyampaikan materi yang kontekstual dan relevan; Pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam membentuk karakter dan moral mahasiswa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya minat mahasiswa terhadap mata kuliah PAI, di mana sebagian dari mereka menganggapnya sebagai mata kuliah formalitas yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan profesional mereka. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang kurang inovatif dan masih bersifat konvensional juga menjadi kendala dalam menarik perhatian mahasiswa. Tantangan lainnya adalah perbedaan pendekatan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam, di mana perguruan tinggi umum cenderung memiliki keterbatasan dalam alokasi waktu dan metode pengajaran PAI dibandingkan dengan institusi berbasis Islam. Variasi standar kurikulum dan kompetensi dosen juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyampaian materi PAI di berbagai perguruan tinggi.

Selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena arus informasi yang tidak terkontrol dapat memengaruhi cara mahasiswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik, memperkuat kompetensi dosen, serta mengadaptasi kurikulum PAI agar lebih relevan dengan dinamika kehidupan modern. Meskipun kebijakan PAI telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, antara lain:

Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi, diperlukan berbagai strategi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mahasiswa. Salah satu strategi utama adalah revitalisasi kurikulum, yaitu dengan menyesuaikan materi PAI agar lebih relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti etika digital, kepemimpinan Islam, serta peran Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi langkah penting, seperti pemanfaatan e-learning, media sosial, serta metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring agar lebih interaktif dan menarik bagi mahasiswa.

Peningkatan kompetensi dosen juga harus menjadi prioritas, melalui pelatihan dan workshop yang mendorong pengajaran dengan pendekatan kontekstual, moderat, dan inklusif. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan dan lembaga keagamaan dalam mengadakan kegiatan yang mendukung pemahaman Islam secara mendalam, seperti seminar, kajian Islam, dan program pembinaan karakter berbasis agama. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan PAI juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan menyusun langkah-langkah perbaikan. Dengan strategi yang tepat, kebijakan PAI dapat berjalan lebih efektif dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter islami yang kuat dan mampu menghadapi tantangan kehidupan modern.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PAI di perguruan tinggi, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

Revitalisasi Kurikulum

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Menyesuaikan materi PAI dengan kebutuhan zaman, seperti isu-isu kontemporer dalam Islam, etika digital, dan kepemimpinan berbasis nilai Islam;

Pengembangan kurikulum berbasis proyek yang menghubungkan konsep Islam dengan praktik kehidupan nyata.

Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran

Pemanfaatan platform digital seperti e-learning, podcast, dan media sosial sebagai sarana penyampaian materi PAI; Penerapan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring.

Peningkatan Peran Dosen dan Tenaga Pengajar

Pelatihan bagi dosen agar mampu mengadaptasi metode pengajaran yang lebih kontekstual dan menarik; Penguatan kapasitas dosen dalam mengajarkan nilai-nilai Islam secara moderat dan inklusif.

Kolaborasi dengan Organisasi Kemahasiswaan dan Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di dalam dan luar kampus; Kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan seminar, kajian, dan kegiatan sosial berbasis Islam.

Implikasi Kebijakan PAI terhadap Karakter Mahasiswa

Implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa, baik dalam aspek moral, sosial, maupun spiritual. Salah satu implikasi utama adalah terbentuknya akhlak dan moral yang kuat, di mana mahasiswa dididik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik, sosial, maupun profesional. Selain itu, kebijakan PAI juga berkontribusi dalam menanamkan sikap moderasi beragama, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman Islam yang inklusif, toleran, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat yang beragam secara harmonis.

Lebih jauh, melalui PAI, mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam, yang mendorong mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler berbasis keislaman, mahasiswa dapat lebih aktif dalam membangun kesadaran spiritual dan sosial, sehingga mereka tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kebijakan PAI di perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang bijaksana dan berprinsip.

Implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berkontribusi terhadap pembentukan karakter mahasiswa, terutama dalam aspek: 1) Akhlak dan Moral: Membantu mahasiswa memiliki nilai etika yang kuat dalam kehidupan sosial dan profesional; 2) Moderasi Beragama: Mengembangkan pemahaman Islam yang inklusif dan toleran dalam masyarakat yang beragam; 3)Kepemimpinan Islam: Membentuk mahasiswa yang mampu menjadi pemimpin berlandaskan nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral berbasis nilai-nilai Islam. Implementasinya dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, metode pembelajaran yang interaktif, kegiatan ekstrakurikuler, serta peran dosen dan tenaga pengajar. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya minat mahasiswa, perbedaan pendekatan antara perguruan tinggi umum dan Islam, serta pengaruh globalisasi dan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, strategi yang dapat diterapkan meliputi revitalisasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, peningkatan peran dosen, serta kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan PAI memiliki dampak positif dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama dalam aspek akhlak, moderasi beragama, dan kepemimpinan Islam, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan profesional dengan nilai-nilai Islam yang kuat

DAFTAR REFERENSI

Achmad, Nur Fauzi. “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City.” Faculty of Social and Political Science, 2018.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Aladdiin, Hisyam Muhammad Fiqyh, and Alaika M Bagus Kurnia Ps. "Peran Materi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan." Jurnal Penelitian Medan Agama 10, no. 2 (2019).

Fakhruddin, Agus. "Telaah Karakteristik Kebijakan PAI Di Perguruan Tinggi: Perspektif Pendidikan Umum." TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education 8, no. 1 (2021): 1–11.

Gusman, Burhanudin Ata. "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2022): 187–205.

Hamka, Hamka. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." Scolae 1, no. 1 (2018): 92–100.

Hapsari, Swita Amallia, and Heri Pamungkas. "Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Online Di Universitas Dian Nuswantoro." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 18, no. 2 (2019): 225–33.

Hasan, Ibnu. "Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam." Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2016): 1–20.

Hastutie, Ghina. "Kurikulum Merdeka Dan Profil Pelajar Rahmatan Lil'Alamin Pada Pembelajaran Rumpun PAI Di Madrasah Dan PTAI." Indonesian Research Journal on Education 4, no. 4 (2024): 973–81.

Husaini, Adian. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Pandangan Adian Husaini." Journal of Research and Thought of Islamic Civilitation, 2018.

Ibadin, Hasan, Musthofa Musthofa, and Ahmad Arifi. "Kebijakan Merdeka Belajar Dan Implikasinya Terhadap Desain Model Perkuliahan PAI Di Perguruan Tinggi Islam." Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia 3, no. 2 (2023): 325–48.

Indriya, Indriya, Helina Amara, Haifa Nusaibah, and Intan Nurmala. "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 001 (2022): 433–50.

Milidar, Khima. "Inovasi Pembelajaran Pai Dengan Pendekatan Interaktif Untuk Generasi Milenial." Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 7, no. 2 (2024): 6275–84.

Muhammedi, Muhammedi. "Perubahan Kurikulum Di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal." Jurnal Raudhah 4, no. 1 (2016).

Muslim, Abd Qadir, I Gede Sedana Suci, and Muhammad Rizki Pratama. "Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar 6, no. 2 (2021): 170–86.

Nata, Abuddin, and Fauzan. Filsafat Pendidikan Islam. Gaya Media Pratama, 2005.

Nurmela, Siti, Uus Ruswandi, and Bambang Samsul Arifin. "TANTANGAN PEMBELAJARAN PAI DI PERGURUAN TINGGI UMUM." ABDUSSALAM: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam 1, no. 1 (2025): 33–41.

Purwanto, Yedi, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi. "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 17, no. 2 (2019): 110–24.

Rahma, Fatikh, Asmuni Zain, Zainul Mustain, and Rokim Rokim. "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual Dan Moralitas Di Era Digital Melalui Pendidikan Agama Islam." JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah) 6, no. 2 (2024): 94–103.

Rusdiani, Atik. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sudrajat, Tatang, Uus Ruswandi, and Bambang Syamsul Arifin. "Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum: Kebijakan Dan Implementasi." Jurnal Pendidikan: Riset&Konseptual 5, no. 2 (2021): 178–86.

Umam, Khotibul. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Islam Sinkronisasi Dengan Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Kkni)." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 01 (2021).

Yuniarti, Ira, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah." Modeling: Jurnal Program Studi PGMI 9, no. 1 (2022): 182–207.